

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anggaran adalah suatu rencana kuantitatif (satuan jumlah) periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran (*budget*) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga barang/jasa (Nafarin, 2007).

Menurut KBBI, penganggaran adalah kegiatan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai sasaran usaha dalam jangka (waktu) tertentu. Dalam pemerintahan, penganggaran memiliki tujuan untuk mengalokasikan sumber daya kepada belanja untuk memaksimalkan pembangunan nasional. Penyerapan anggaran merupakan salah satu tolok ukur kinerja pemerintah dalam menggerakkan roda perekonomian dan menjadi salah satu indikator evaluasi kinerja yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 249/PMK.02/2011 pasal 4 ayat 2, yaitu evaluasi kinerja atas aspek implementasi dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi kinerja mengenai pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran. Penyerapan anggaran yang optimal tentu menjadi hal penting untuk memaksimalkan pembangunan nasional. Supaya terjadi pemerataan pembangunan pada tingkat daerah, Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk masing-masing daerah otonom. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu komponen belanja pada APBN sekaligus menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD.

Pada tahun 2018, Pemerintah Pusat telah menambahkan dana berupa Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan yang kemudian diatur dalam PMK Nomor 187/PMK.07/2018. Tujuan alokasi DAU tambahan ini untuk memberi dukungan pendanaan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota melalui dana kelurahan dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi kelurahan. Dana tersebut kemudian digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sesuai dengan UU Permendagri Nomor 130 tahun 2018. Dengan adanya alokasi dana kelurahan, pemerintah berharap bisa diserap sepenuhnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat juga pembangunan infrastruktur di tingkat kelurahan (Widiari, 2019).

Menurut Putri (2014), penyerapan anggaran dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya adalah faktor perencanaan, faktor administrasi, faktor sumber daya manusia (SDM), dan faktor dokumen pengadaan. Menurut Mahsun (2013), perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam anggaran dana kelurahan, faktor perencanaan sangat berpengaruh terhadap daya serap anggaran karena dibutuhkan dokumen-dokumen perencanaan untuk anggaran kegiatan. Untuk mengalokasikan anggaran dana kelurahan, camat harus menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) atas usul lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Menurut KBBI, administrasi diartikan sebagai usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan atau kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan tata usaha. Dalam

faktor administrasi dibutuhkan ketelitian dalam pencatatan administrasi dokumen anggaran dan mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP). Penentuan akun yang tidak tepat, dan kurangnya pemahaman mengenai mekanisme pembayaran tentunya dapat menghambat pelaksanaan kegiatan yang telah disusun atau direncanakan. Hal tersebut dapat menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran dana kelurahan.

Menurut Mangkunegara (2012), kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya manusia. Dalam faktor kompetensi SDM, pemasalahan yang sering terjadi yaitu adanya rangkap tugas karena kurangnya personel pejabat kelurahan yang bersertifikasi untuk melakukan tugas pengadaan barang dan jasa. Pejabat yang memiliki fungsi sebagai pengelola anggaran dana kelurahan memiliki peran yang penting supaya penggunaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan bisa efektif dan efisien. Pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien dapat mencerminkan penyerapan anggaran dana kelurahan yang optimal.

Menurut Keppres No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan, dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa. Dalam faktor dokumen pengadaan, sering terjadi kesulitan untuk menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Bila terjadi perubahan jumlah anggaran pada

kontrak kerja, maka seharusnya tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK). SPK yang merupakan dokumen pengadaan berfungsi menjadi bukti bahwa kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan. Kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut akan dilaporkan dalam realisasi anggaran dana kelurahan, yang nantinya akan memunculkan persentase penyerapan anggaran dana kelurahan.

Terdapat berbagai penelitian terdahulu yang dilakukan terkait dengan penyerapan anggaran. Beberapa penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Putri (2014) yang menganalisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada SKPD di Pemerintah Provinsi Bengkulu, menunjukkan hasil bahwa terdapat 3 faktor yang memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran pada SKPD yaitu kompetensi SDM, dokumen pengadaan, dan uang persediaan. Sedangkan 2 faktor lain yaitu dokumen perencanaan dan pencatatan administrasi tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran SKPD Pemerintah Provinsi Bengkulu. Namun terdapat hasil yang berbeda dalam penelitian yang dilakukan oleh Saprudin (2018) tentang pengaruh dokumen perencanaan dan kompetensi SDM terhadap penyerapan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bolango, dimana hasilnya menunjukkan bahwa dokumen perencanaan dan kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran baik secara parsial maupun simultan.

Penelitian yang dilakukan oleh Bayu (2015) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja Satuan Kerja TNI AD menunjukkan hasil yaitu faktor perencanaan, faktor administrasi, faktor SDM dan faktor ganti uang persediaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran

belanja. Sedangkan faktor dokumen pengadaan tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja. Berbeda dengan penelitian oleh Wirawan (2016) yang mengungkapkan bahwa dokumen pengadaan dan uang persediaan memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap penyerapan anggaran pada SKPD Kota Medan. Namun penelitian tersebut menunjukkan bahwa dokumen perencanaan tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran SKPD Kota Medan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mutmainna dan Iqbal (2017) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran SKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa pergantian pimpinan, dokumen perencanaan, kompetensi SDM, dokumen pengadaan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran namun pencatatan administrasi tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran SKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat hasil yang berbeda mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran sehingga peneliti termotivasi untuk menguji beberapa variabel dalam penelitian tersebut pada objek yang berbeda. Variabel yang dipilih peneliti adalah dokumen perencanaan, pencatatan administrasi, kompetensi SDM, dan dokumen pengadaan yang sesuai dengan fenomena dana kelurahan di Kota Yogyakarta.

Kota Yogyakarta terdiri dari 45 Kelurahan yang tersebar di 14 Kecamatan. Berdasarkan lampiran PMK Nomor 187/ PMK.07/ 2018, Kota Yogyakarta mendapat kategori baik sehingga setiap kelurahan mendapat dana sebesar Rp 352.941.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus empat puluh satu

ribu rupiah) yang diterima setiap periode. Pelaksanaan program dana kelurahan di Kota Yogyakarta baru dilaksanakan pada tahun 2019 (Hidayah, 2019). Meskipun alokasi dana kelurahan baru diterapkan, namun penyerapannya sudah bisa dianggap cukup maksimal. Dari temuan audit BPK, penyerapan dana kelurahan di Kota Yogyakarta sudah mencapai 90% untuk tahun 2019. Sedangkan untuk periode berjalan tahun 2020 hingga bulan April, penyerapan dana kelurahan belum mencapai 40%. Sehingga tingkat serapannya masih kurang maksimal.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan bahan evaluasi bagi pemerintah kota dalam mengambil suatu kebijakan mengenai penyerapan anggaran dana kelurahan yang baru saja diberlakukan pada tahun 2019. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Dokumen Perencanaan, Pencatatan Administrasi, Kompetensi SDM, dan Dokumen Pengadaan terhadap Penyerapan Anggaran Dana kelurahan Di Kota Yogyakarta”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah dokumen perencanaan berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran dana kelurahan?
2. Apakah pencatatan administrasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran dana kelurahan?

3. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran dana kelurahan?
4. Apakah dokumen pengadaan berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran dana kelurahan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji kembali pengaruh variabel independen (dokumen perencanaan, pencatatan administrasi, kompetensi sumber daya manusia, dan dokumen pengadaan) terhadap variabel dependen (penyerapan anggaran dana kelurahan). Penelitian dilakukan di Kota Yogyakarta karena dana kelurahan baru diberlakukan tahun 2019 maka pelaksanaannya belum lama diterapkan, sehingga penelitian diharapkan mampu menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan dan evaluasi mengenai penyerapan anggaran dana kelurahan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Kontribusi Teori

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penelitian dan dapat menjadi sumber referensi tambahan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

2. Kontribusi Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan bahan evaluasi bagi kelurahan-kelurahan di Kota Yogyakarta dalam rangka memaksimalkan penyerapan anggaran dana kelurahan.



BAB 2